

**EVALUASI PENGEMBANGAN KAWASAN AFIRMATIF
MENUJU DESA MANDIRI
(Studi Pembangunan Kawasan Perdesaan *Agroforestry Coffee*
di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat)**

Mansyur

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
mansyurachmadipdn@gmail.com

ABSTRACT

The focus of this research is to evaluate the development of affirmative area to independent village (study of rural agroforestry development in Pangalengan Regency, Bandung Regency West Java Province), by assessing how successful the rural development program and the role of Government, local government, village government, private and community together, integrated, and multy sector in an effort to accelerate and improve the quality of service, development, and empowerment of rural community to independent village by using six evaluation policy criteria according to William N Dunn, as material for improvement of program implementation in the next year according to planning stage . The method of this research is to use the combined method of qualitative descriptive, inductive, and data collection through interview, observation, documentation and Forum Group Discussion (FGD) conducted in the office and location of the area to know the extent of the implementation of rural development. The results showed that, by considering the results of the evaluation (On -Going) almost meet the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, while the criteria of smoothing and precision has not been met optimally, and so far only focus on infrastructure activities have not touched the program of quality improvement Human resources and empowerment community. it can be concluded that there is a better development of the village as a result of the implementation of development programs in the first and second year, only not yet reached the achievement of the target of the village status independently.

Keywords: *evaluation, rural area development, a self-sufficient village*

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah Evaluasi pengembangan kawasan afirmatif menuju desa mandiri (studi pembangunan kawasan perdesaan *agroforestry coffee* di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat), dengan menilai sejauhmana keberhasilan program pembangunan kawasan perdesaan dan peran Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat secara terintegrasi, terpadu, multi sektor dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn. Penelitian

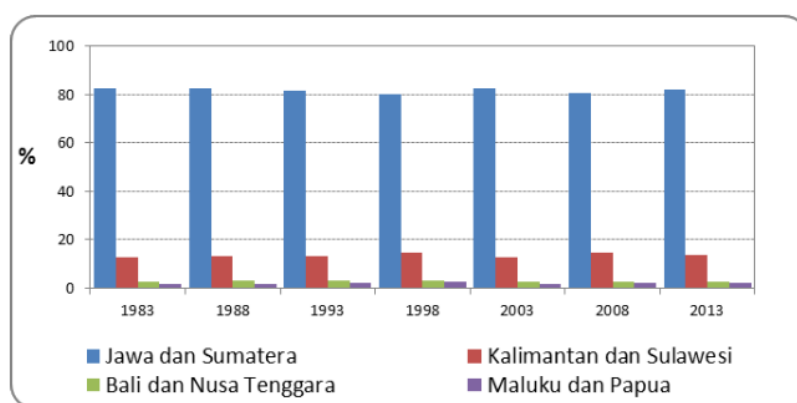
ini bertujuan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program di tahun berikutnya sesuai tahapan perencanaan yang sudah ditetapkan. Metode penelitian ini menggunakan gabungan antara deskriptif kualitatif, induktif, dan pengumpulan data melalui cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan *Forum Group Discussion* (FGD) untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memperhatikan hasil evaluasi (*On -Going*) hampir memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, sedangkan pada kriteria perataan dan ketepatan belum terpenuhi secara maksimal. Sejauh ini kegiatan baru berfokus pada infrastruktur saja belum menyentuh program peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kesimpulan bahwa terdapat perkembangan desa kearah yang lebih baik sebagai hasil dari pelaksanaan program pembangunan di tahun pertama dan kedua, hanya saja belum sampai pada pencapaian target status desa mandiri.

Kata kunci: evaluasi, pembangunan perdesaan, kawasan afirmatif, desa mandiri

PENDAHULUAN

Kesenjangan antar-wilayah masih merupakan tantangan besar dalam pembangunan nasional. Angka resmi pemerintah maupun non pemerintah menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur dan sejumlah indikator lain merupakan sedikit fakta yang menyebabkan terjadinya kesenjangan baik antar wilayah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa. Kesenjangan dari aspek ekonomi

misalnya, sangat terlihat dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih terpusat di Jawa dan Bali. Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu indikator kesenjangan adalah kontribusi PDRB KBI selama 30 tahun (1983-2013) sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB (lihat Gambar 1).



Gambar 1

Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional 1983-2013 (Persen)

Sumber: BPS 1983-2013

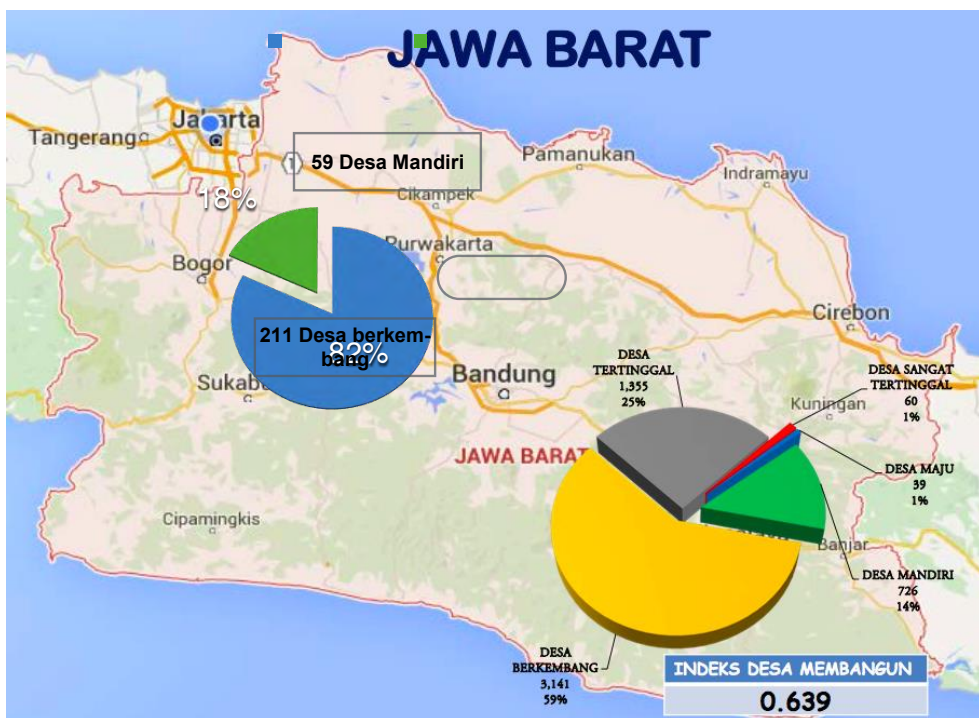
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Tahun 2016¹ mencatat bahwa sesuai dengan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Data BPS menunjukkan, dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa, jumlah tersebut naik dari 2014 yang berjumlah 252 juta jiwa. Selain itu, BPS menunjukkan, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia pada 2014 dan 2015 relatif sama, yaitu sebesar 101,02 dan 101. Rasio jenis kelamin, BPS menuliskan, menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Adapun, komposisi penduduk kota atau desa menunjukkan penduduk Indonesia pada 2015 lebih banyak di pedesaan, yakni 128,5 juta jiwa, sementara di perkotaan besar hanya sebanyak 126,3 juta jiwa. Meskipun jumlah penduduk di pedesaan lebih besar, pertambahan penduduk dari 2014 ke 2015 di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan pedesaan, tercatat pertambahan penduduk di perkotaan mencapai 1,75% sementara di pedesaan 0,52%. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia secara tahunan menjadi 28,51 juta orang pada September 2015 atau bertambah 780 ribu orang dibanding September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang, dari sisi geografis jumlah penduduk miskin paling banyak mendominasi di pulau Jawa sebesar 15,31 juta jiwa, sementara sisanya tersebar di Sumatera sebesar 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta jiwa, pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku sebanyak 1,53 juta jiwa, dan Kalimantan 0,99 juta jiwa. Kabupaten Bandung termasuk ke

dalam Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup banyak di Jawa Barat yaitu sekitar 8% atau 288.000 Jiwa di tahun 2016, data tersebut meningkat dari tahun 2015 yaitu 7,94% atau sebesar 25.000 jiwa meningkat sebesar 0,6% dari tahun sebelumnya .

Sesuai Visi Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bandung secara normatif diorientasikan agar selaras dengan target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu mengurangi 5.000 desa tertinggal menjadi 2000 desa berkembang. Berdasarkan data IDM menunjukan bahwa dari 5.321 Desa di Jawa Barat baru 726 desa atau sekitar 14% yang masuk dalam kategori desa mandiri di Provinsi Jawa Barat, dari jumlah tersebut sebanyak 59 desa dari 270 desa atau 39% mandiri di Kabupaten Bandung:

Pemerintah dan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menetapkan kebijakan, oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap pembangunan kawasan afirmatif di Kabupaten Bandung khususnya Kawasan *Agroforestry Coffee* di Kecamatan Pangalengan sangat penting untuk diperhatikan dan diteliti lebih lanjut. Diharapkan pembangunan kawasan perdesaan tersebut dapat menjadi daya ungkit percepatan pembangunan kawasan menuju desa mandiri, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa.

1 Buku Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2015



Gambar 2
Indeks Desa Mandiri di Jawa Barat Tahun 2015

Persoalannya adalah bagaimanakah pelaksanaan program pembangunan Kawasan Perdesaan Affirmative *Agroforestry Coffee* dalam mendorong kemandirian desa di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan program pembangunan Kawasan Perdesaan Affirmative *Agroforestry Coffee* dalam mendorong kemandirian desa di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran². Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan³.

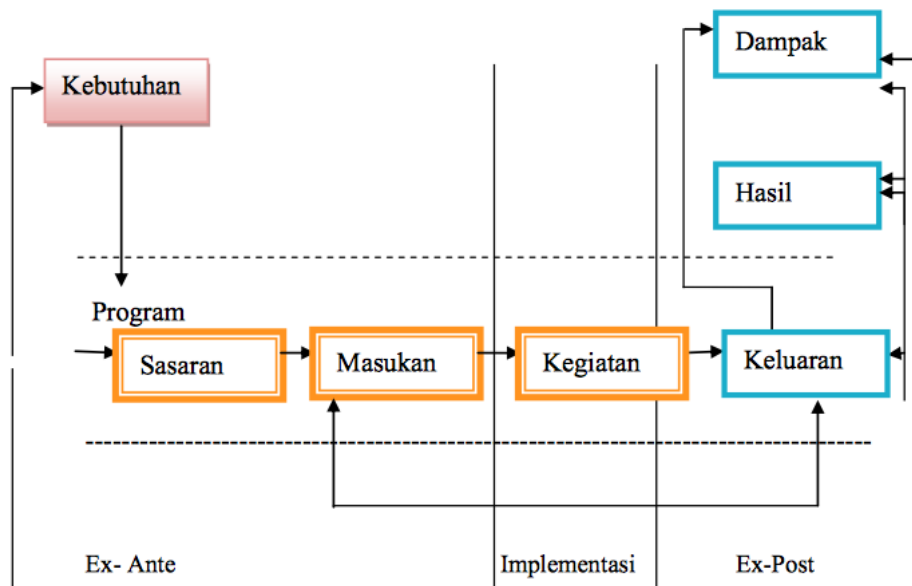
TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui

² John M Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal 220.

³ Martha Yunanda, *Evaluasi dalam Islam*, 2009. diunduh dari <<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/1956775-evaluasi-dalam-islam/>> 01 Mei 2017.



Gambar 3
Siklus Pengelolaan program

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha⁴ dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan program sebagaimana gambar 3.

Apabila memperhatikan tiga tahapan evaluasi diatas, maka penelitian ini termasuk kedalam tahapan evaluasi **On-Going** dimana pada tahapan ini evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat efektifitas, efisiensi, kecukupan,

perataan, responsifitas dan ketepatan⁵ pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan *agroforestry coffee* dibandingkan dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya dalam dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) di Kabupaten Bandung. William N. Dunn⁶, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

4 Taliziduhu Ndraha. *Konsep Administrasi dan Administrasi Indonesia* Jakarta: Bina Aksara, 1989, hal 201.

5 William N Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan publik*, Gadjah Mada University Press. Jogjakarta, 1999, hal 610

6 William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press:Jogjakarya, 1999, hlm.608.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku “Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia” berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya⁷. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar⁸ Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah di bakukan. Ralp Tyler, 1950 (dalam Suharsimi, 2007) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Pengertian program menurut Economic Development Institute World Bank yang dikutip oleh Reksopoetranto. S, menjelaskan bahwa program

pembangunan adalah usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan kepada sektor yang mencakup beberapa proyek⁹. Istilah program lebih lanjut menurut Kunardjo antara lain adalah:

1. Program dapat merupakan kegiatan baru, seperti program KB, tetapi sering juga muncul kegiatan lanjutan ditengah kegiatan yang sedang berjalan, seperti program imunisasi.
2. Program adalah sekumpulan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Program sering terus berlanjut
4. Pemeriksaan terhadap program ditekankan pada 3 aspek, yaitu :
 - Konsep dari program secara rasional
 - Pelaksanaan dan proses operasi
 - Efek dan dampak

Pembangunan Kawasan Desa

Istilah pembangunan yang merupakan terjemahan dari kata development baru kita kenal setelah Perang Dunia Kedua, dalam pengertian pembangunan terkandung arti adanya suatu usaha untuk mengembangkan, memperbaharui, mengganti yang tidak atau kurang baik dengan yang baik, dalam pengertian pembangunan tersebut terkandung pula arti adanya suatu usaha agar benar-benar lebih maju terus dengan modernisasi dan pembaharuan¹⁰. Hakikat dari pembangunan adalah perubahan kearah kondisi yang lebih baik (Bintoro dan Mustofadidjaja, 1992:3). oleh karena itu kegiatan pembangunan harus dilakukan

7 Taliziduhu Ndraha, 1989. *Konsep Administrasi di Indonesia*, Bina Aksara Jakarta, 1989, hal 201.

8 Dalam Suharsimi Arikunto, dan Abdul Jabar *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan*, 2004, Jakarta: Bumi Aksara, hal 14.

9 Reksopoetranto. S., *Manajemen Proyek Pembangunan.*, 1992, FE Univresitas Indonesia. Jakarta, hal

10 Pendapat Soedjono Hoemardani: 1981:1 dalam Agus Hadiawan, *Teori Pembangunan*, 2006, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hal 4.

secara terarah dan terencana. Terarah berarti terdapat kejelasan langkah dan sasarannya, sedang terencana berarti jelas tujuan yang akan dicapai¹¹.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “*Otonomi Desa*” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat¹². Desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Siagian¹³ pembangunan desa adalah “keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan. untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan

dalam desa”. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Sojogyo dan Sagojo¹⁴, pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh terpadu dan terkoordinasi.

Desa mandiri menurut klasifikasi status desa dalam Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, desa mandiri atau yang disebut desa semesta adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. desa mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155 sebagaimana digambarkan pada kerangka pemikiran Gambar 1.

PEMBAHASAN

Regulasi yang menjadi latar belakang program pembangunan kawasan perdesaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

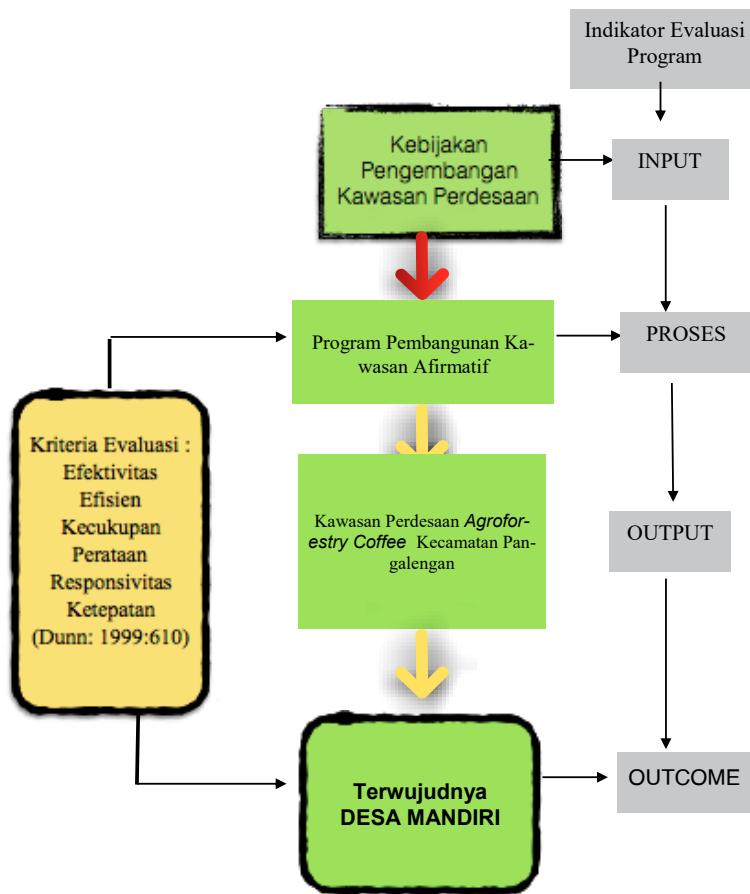
11 Wirman Syafri Sailiwa, *Tesis Hubungan pembinaan dengan Kesiapan Anggota kelompok Swadaya (KSM) Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, 1996*, (Bandung: Universitas Padjajaran), hlm 20.

12 HAW Widjaja, *Otonomi Desa*. Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hal 3.

13 Sondan P Siagian. *Administrasi Pembangunan*, Bina Aksara, 2005, Jakarta, hal 108.

14 Sajogyo, *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1996, Bina Rena Pariwara, Jakarta., hal 136.

Kerangka Pemikiran



Gambar 4
Kerangka Pemikiran

Undang-Undang tersebut mengamatkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Evaluasi program pembangunan kawasan perdesaan tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini secara teknis dilaksanakan oleh peneliti dengan melibatkan Kepala Bappeda Kabupaten Bandung, Kepala

Dinas PMD Kabupaten Bandung, Camat Pangalengan, beserta dengan Kepala Desa Margamulya, pengusaha sekaligus petani kopi, dimana seluruhnya merupakan bagian dari pelaksana pembangunan kawasan perdesaan Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan sebagai responden. Selain itu peneliti juga melakukan observasi lapangan terhadap objek penelitian yaitu Kawasan Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk memperoleh data yang lebih valid. Unsur-unsur tersebut yang

menjadi fokus evaluasi kebijakan program pembangunan kawasan perdesaan Agroforestry di Kecamatan Pangalengan agar kekurangan dalam hal teknis atau operasional dapat dijadikan bahan evaluasi bersama.

Dalam melakukan evaluasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan khususnya pada Kawasan *Agroforestry* Kopi dalam mendukung tercapainya desa mandiri di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, maka peneliti menggunakan teori William N. Dunn dengan menggabungkan enam kriteria sebagai indikator atau tolok ukur supaya dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program serta menilai sejauhmana keberhasilan dari Program pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Adapun evaluasi yang dilakukan merupakan Evaluasi tahapan pelaksanaan dimana evaluasi pada tahap pelaksanaan (*ON-GOING*), evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas menurut Dunn berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula

efektivitasnya.¹⁵ Apabila setelah pelaksanaan program ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu program tersebut telah gagal, namun demikian suatu program hasilnya tidak langsung berdampak, dapat melalui proses tertentu. seperti halnya pembangunan kawasan perdesaan Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung merupakan program jangka menengah yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 -2021.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan tiga indikator mengenai efektifitas pembangunan kawasan perdesaan, yaitu efektif dalam pelaksanaan program, efektif dalam peningkatan ekonomi warga masyarakat dan efektif dalam pengembangan kewilayahan. Sesuai Data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Bandung diperoleh data bahwa Luas Tanam dan Produksi Kopi mengalami peningkatan tahun 2016 Luas Tanam mencapai 10.027 Ha dan produksi mencapai 27.625,11 Ton untuk bahan mentah dan 6.906,28 Ton untuk hasil olahan.

Di samping itu keberhasilan tersebut juga dapat dilihat daripada peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Pangalengan dari Tahun 2015 ke Tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup baik, indikator terbesar penyumbang peningkatan IPM di Kecamatan Pangalengan salah satunya Indeks Daya Beli, hal ini dapat di lihat pada Tabel 1.

15 William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 1999, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, hal 429

Tabel 1 Perbandingan IPM Kecamatan Pangalengan Tahun 2015 -2016

IPM		AHH		AMH		RLS		DAYABELI		Ket
2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
75,17	76,41	72,08	72,58	97,38	97,76	7,18	7,63	646,32	653,41	IPM meningkat

Diolah dari: Data BPS Pangalengan Dalam Angka 2015 -2016

Efektivitas dan **efisiensi** sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Adapun menurut William N. Dunn ¹⁶berpendapat bahwa efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan agroforestry kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung peneliti berpendapat baik dari hasil wawancara, observasi lapangan dan FGD yang telah dilaksanakan dapat dikatakan program pembangunan kawasan perdesaan dipandang cukup efisien pada satu sisi yaitu APBDesa dan swadaya masyarakat, namun disisi lain peneliti melihat adanya peningkatan pendanaan di beberapa objek seperti adanya penambahan anggaran APBN untuk pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan, namun dengan pembiayaan tersebut akan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dari sektor industri kopi, dampak tersebut tidak akan hanya

dirasakan oleh masyarakat kawasan perdesaan saja tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena Desa sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan daerah dan nasional.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan¹⁷ tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan program dan hasil yang diharapkan. Kawasan perdesaan agroforestry kopi sebagai sentra kopi dan pariwisata mutlak memerlukan sarana dan prasarana transportasi jalan yang memadai, kemudahan akses dan kualitas jalan maupun sarana transportasi yang baik diharapkan secara signifikan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi di kawasan. Khusus terkait sumber pembiayaan program, apabila mengacu kepada dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan agroforestry kopi 2016-2019¹⁸, disana sudah ditentukan baik rencana program/kegiatan maupun sumber pendanaan serta pembagian kewenangan dalam pelaksanaannya. Namun dalam penetapan pagu anggaran masih berdasarkan angka perkiraan, sehingga pembiayaan bisa saja berubah

16 William N. Dunn, *Pengantar analisis Kebijakan Publik*, 1999, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, hal 429.

17 William N. Dunn, *Pengantar analisis Kebijakan Publik*, 1999, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, hal 430.

18 Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroforestry Coffee di Kecamatan Pangalengan

sesuai dengan kondisi tetapi tidak mengurangi efektivitas daripada program/kegiatan. Dengan adanya pola pembiayaan multy sektor dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, serta pembagian peran sesuai dengan kewenangan masing-masing, diharapkan dapat memperkecil pengeluaran pembiayaan karena dilakukan secara terintegrasi tetapi tidak mengurangi efektivitas daripada program.

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn¹⁹ menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat²⁰. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor: 14/DPKP/SK/07/2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, bahwa salah satu prinsip pembangunan kawasan perdesaan yaitu berkeadilan. “Keadilan” dimaksud adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Maka dari itu sesuai dengan prinsip tersebut pemerintah daerah

berupaya untuk adil dalam memberikan program dan pendanaan sesuai kewenangan serta memberikan kesempatan kepada unsur lainnya seperti pemerintah desa dan masyarakat sebagai bagian daripada unsur pelaksana pembangunan untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan agroforestry kopi meskipun program/kegiatan tidak merata dan masih terpusat pada Pusat Kawasan di Desa Margamulya, tetapi dampaknya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah kawasan perdesaan. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa kriteria perataan belum terjadi dari sisi pembangunan infrastruktur karena pembangunan masih terpusat pada pusat kawasan yaitu satu desa saja Desa Margamulya, sementara untuk Desa Pulosari dan Desa Margaluru belum ada pembangunan sama sekali. Disamping itu untuk pembangunan SDM masyarakat belum ada intervensi program sama sekali, sehingga pembangunan dipandang belum merata di seluruh sektor. Namun demikian meskipun pembangunan infrastruktur belum merata tetapi dampak dari program yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat di tiga desa dan tidak ada yang dirugikan (*worse off*) atas kebijakan ini, karena pada khirnya nanti seluruh kawasan akan dibangun secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan perdesaan yang telah ditentukan.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respons dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan²¹. Suatu keberhasilan program

19 William N. Dunn, *Pengantar analisis Kebijakan Publik*, 1999, Jogjakarta: Gadjah Mada. University Press, hal 434.

20 William N Dunn. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 434.

21 ed.2, William N. Dunn, *Pengantar analisis Kebijakan Publik*, 1999, Jogjakarta: Gadjah

dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan agroforestry kopi respons dari masyarakat sebagaimana hasil wawancara dan observasi peneliti melihat beberapa kegiatan petani dan pengusaha kopi yang sangat antusias dan responsive terhadap pelaksanaan program perdesaan, karena mereka melihat program ini dapat memberikan angin segar dan nafas baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kopi ditengah-tengah persaingan usaha yang semakin tinggi dan secara tidak langsung hal ini berdampak juga terhadap petani kopi di pangalengan yang tidak mampu bersaing dengan kualitas kopi yang lebih baik terutama dari sisi produksi sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriteria responsivitas pada upaya pengembangan potensi wilayah khususnya sub sektor kopi di kawasan perdesaan agroforestry kopi di Kecamatan Pangalengan telah terpenuhi.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada)²². Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun

negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. Dalam konteks pembangunan kawasan afirmatif agroforestry kopi, sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2016 -2019, yang melatar belakangi ditunjuknya kawasan tersebut menjadi sasaran pembangunan kawasan perdesaan adalah selain memiliki potensi yang cukup, juga memiliki karakteristik yang sama dan dominan yaitu kopi namun permasalahannya adalah masih kurangnya produktivitas daripada hasil kopi dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana serta kemampuan SDM sehingga menyebabkan kurangnya daya saing yang mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta menyandingkan dengan dokumen perencanaan yang ada, bahwa alternatif yang diambil pemerintah melalui pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam mendorong terwujudnya desa mandiri di Kabupaten Bandung, pengembangan daya saing potensi kopi adalah sangat tepat mengingat kopi merupakan potensi yang sudah mendunia di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Petani kopi sebelumnya hanya bisa menjual kopi mentah yang harganya jauh lebih murah dan pengolahannya yang masih tradisional, diharapkan dengan adanya program ini dapat dijadikan sebagai prioritas kebijakan pemerintah ke depannya, sehingga dapat menjawab segala persoalan yang menjadi hambatan dalam perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya

Mada University Press, hal 437
22 ed.2, William N. Dunn, *Pengantar analisis Kebijakan Publik*, 1999, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, hal 499.

petani kopi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriteria ketepatan telah terpenuhi dalam mengambil kebijakan program pembangunan kawasan perdesaan agroforestry kopi khususnya bagi pengembangan potensi kopi dan mendorong kemandirian desa di Kabupaten Bandung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa hasil evaluasi kebijakan program afirmasi di kawasan perdesaan Agroforestry Kopi Pangalengan berdasarkan kriteria Evaluasi menurut William N Dunn sebagai berikut; **pertama**, efektivitas, berdasarkan hasil penelitian data menunjukkan bahwa kebijakan program afirmasi pembangunan kawasan perdesaan pada Kawasan Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dipandang cukup efektif, hal ini dapat dilihat daripada peningkatan angka IPM di Kecamatan Pangalengan yang meningkat dari Tahun 2015-2016.

Kedua, efisiensi, sesuai dengan tujuan daripada pembangunan kawasan perdesaan yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan kemandirian desa melalui optimalisasi pembiayaan multy sektor dan pola keterpaduan dengan prinsip integratif di mana dalam pelaksanaannya terdapat pembagian peran antara pemerintah desa, hal ini tentu saja akan mempercepat pembangunan dan meringankan beban pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian desa. dan dipandang cukup efisien. **Ketiga**, kecukupan, melalui pola pembiayaan multy sektor dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, serta pembagian peran sesuai dengan kewenangan masing-masing, diharapkan dapat memperkecil

pengeluaran pembiayaan karena dilakukan secara terintegrasi tetapi tidak mengurangi efektivitas daripada program.

Keempat, perataan, kriteria perataan belum terjadi dari sisi pembangunan infrastruktur karena pembangunan masih terpusat di Pusat kawasan yaitu satu desa saja Desa Margamulya, sementara untuk Desa Pulosari dan Desa Margaluru belum ada pembangunan sama sekali. Disamping itu untuk pembangunan SDM masyarakat belum ada intervensi program sama sekali, sehingga pembangunan dipandang belum merata di seluruh sektor. Namun demikian meskipun pembangunan infrastruktur belum merata tetapi dampak dari program yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat di tiga desa dan tidak ada yang dirugikan (*worse off*) atas kebijakan ini. **Kelima**, responsivitas, respons dari masyarakat terhadap program ini dipandang dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dengan adanya program yang terintegrasi maka hal ini dapat mempercepat kemandirian masyarakat dan desa, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriteria responsivitas pada upaya pengembangan potensi wilayah khususnya sub sektor kopi di kawasan perdesaan agroforestry kopi di Kecamatan Pangalengan telah terpenuhi.

Keenam, ketepatan, dalam hal ketepatan sesuai dengan hasil penelitian dan menyandingkan dengan dokumen yang ada, peneliti melihat bahwa alternatif yang diambil pemerintah melalui pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam mendorong terwujudnya desa mandiri di Kabupaten Bandung melalui pengembangan daya saing potensi kopi adalah sangat tepat mengingat kopi

merupakan potensi yang sudah mendunia di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroforestry Kopi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. saran tersebut antara lain:

1. Diharapkan untuk mendorong kemandirian desa tidak hanya terpusat pada kegiatan infrastruktur saja melainkan perlunya ada program peningkatan kualitas SDM masyarakat dan aparatur pemerintah desa sebagai bagian daripada pelaksana kebijakan program pembangunan kawasan perdesaan.
2. Optimalisasi peran kelembagaan bersama (BUMDES) sebagai lembaga yang mengelola perekonomian kawasan perlu ditingkatkan dan dilakukan pendampingan serta pembinaan dalam pelaksanaannya yang dilakukan selain oleh Tim TKPKP juga oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Perlu adanya indikator dan cara perhitungan yang jelas dalam menilai sejauhmana keberhasilan program dalam mendorong kemandirian desa yang dilakukan oleh lembaga resmi, seperti saat ini kebingungan terjadi ketika akan menentukan status satu desa apakah sudah mandiri atau belum, dikarenakan indikator penilaian yang ditetapkan oleh Bappenas dan KemendesaPDTTran berbeda sehingga membingungkan bagi pemerintah daerah dalam menentukan pilihan kebijakan mana yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.
4. Dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan diharapkan pembangunan bisa merata di semua sektor, mulai dari infrastruktur, sosial dan ekonomi. kemudian program juga dilaksanakan di seluruh wilayah yang termasuk dalam kawasan agar prinsip berkeadilan dapat terwujud dan kemandirian desa dapat tercapai.
5. Pembinaan dan pendampingan melalui pengendalian dan evaluasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan agar dilaksanakan disetiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan untuk menjamin sejauhmana keberhasilan program yang sedang dan sudah dilaksanakan dalam mendorong kemandirian desa, sekaligus menganalisa permasalahan dan kendala yang menghambat keberhasilan program agar dapat diantisipasi dan menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program di tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reneka Cipta.
- _____. 2009. Ed. Revisi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. 2002. Ed. Rev. Cet. 12. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan edisi revisi*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.

- _____ dan Cipi Safruddin Jabar. 2008. *Evaluasi program pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arthur G. Gedeian dkk. 1991. *Organization Theory and Design*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2016. *Kabupaten Bandung Dalam Angka*. Kab.Bandung: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2016. *Kecamatan Dalam Angka*. Kab. Bandung: Badan Pusat Statistik.
- Crawford, John. 2000. Ed. 2. *Evaluation of Libraries and Information Services*. London: Aslib, the association for information management and information management international.
- Corbin, Juliet, dan Anselm Strauss, 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Deming, W.E. 1950. *Some theory of Sampling*. New York: John Wiley & Sons.
- Djaali dan M. Pudji. 2008. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Dunn, Wiliam N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan publik*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Echols, John M and Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadiawan, Agus. 2006. *Teori Pembangunan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hisyam Zaini.2008. *Srategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: Insan Mandiri.
- Husein Umar. 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Kecamatan Dalam Angka
- Mahmudi. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Muchsin, H Dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes, Malang.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh Nazir, 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh.2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 1989. *Konsep Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Odaro, Michael, P dan Smith Stephen, C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Patton, Carl. V dan David S. Sawicki.1993. *Basic Methods of Policy Analys and Planning*. Prentice Hall Upper Saddle River N.J 07458.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Sudjana, Djudju. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan (Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*. Bandung: Falah Production.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an. 2009. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Sagojo dan Pudjiwati, Sagojo. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sajogyo, 1996. *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bina Rena Pariwisata, Jakarta.

Siagian, Sondang, P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Syafri, Wirman dan P. Israwan Setyoko. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor

Tague-Sutcliffe, J.M. “Some Perspective on the Evaluation of Information Retrieval System”, *Journal of the American Society for Information Science*, 47(1), 1996: 1-3.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Rajawali Pers: Jakarta.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik (teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAP

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 -2021.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan Kawasan Perdesaan Agroforestry Coffee di Kecamatan Pangalengan kabupaten Bandung.

Sumber Lain

Lababa, Djunaedi. 2008. *Evaluasi program: sebuah pengantar*. <<http://evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah-pengantar.html> > 01 Mei 2017

Labolo, Muhadam. 26 April 2017. “*Makalah Desa Dalam Tinjauan Filosofi Pemerintahan*”(artikel). Jakarta. Wordpress.

Syafri, Wirman. 1996. *Hubungan pembinaan dengan Kesiapan Anggota kelompok Swadaya (KSM) Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang* (tesis). Bandung:Universitas Padjajaran.

Uzer, Usmar. 2003. *Menjadi Guru profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Wikipedia. 2010. Information Needs. <http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Needs >20 Mei 2017

Yunanda, Martha . 2009. *Evaluasi dalam Islam*. <<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/1956775-evaluasi-dalam-islam/>> 01 mei 2017